



Kacamata Driyarkara adalah program kerja Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2020 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran atas isu-isu kontemporer baik di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, maupun ekonomi dari perspektif BEM USD. Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara:

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Titik Nadir

Yoga A.Pongturluran

Martha Eliza Sellyn

Adryan Frediyanto

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020

Memasuki penghujung tahun 2020, masyarakat luas mulai menyoroti kontestasi politik yaitu Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan kegiatan pemilihan kepala daerah bersama dengan wakil kepala daerah secara langsung. Pilkada diperuntukkan guna memilih gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk tingkat kota. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pilkada tahun 2020 dinilai sarat akan cerita intrik di dalamnya. Salah satu hal yang membuat Pilkada tahun 2020 terasa berbeda adalah akan diselenggarakan ketika masa pandemi

Covid-19 masih belum berakhir. Pilkada 2020 rencananya akan digelar secara serempak pada masa pandemi. Terdapat 270 daerah di Indonesia yang bersiap untuk memilih kepala daerahnya. Tahapan Pilkada dimulai dari akhir Agustus hingga Desember 2020.¹ Sementara itu, proses pemungutan suara direncanakan akan digelar secara serentak pada Desember 2020. Sebanyak 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sistem Pilkada secara serentak pada tahun 2020 ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia.² Pilkada sistem pemungutan suara secara langsung dalam teknisnya tentu perlu mendatangkan semua warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pilkada merupakan rangkaian kontestasi politik yang cukup besar dan memerlukan upaya dari berbagai pihak. Tidak heran bahwa hampir di setiap pemilihan kepala daerah sering dijumpai berbagai rangkaian kegiatan yang mewarnai seperti kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, pemungutan suara, proses pengawalan hasil suara, rekapitulasi suara dan lain-lain. Berbagai rangkaian Pilkada tersebut tentunya melibatkan banyak orang di dalamnya. Di sisi lain, saat ini pemerintah, baik daerah maupun pusat sedang menggenjot penurunan laju penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan, larangan berkerumun, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan kebijakan lainnya. Dua gambaran fenomena besar tersebut merupakan hal yang berkebalikan. Di satu sisi, diperlukan Pilkada untuk mendapatkan kepala daerah baru, di sisi lain kebijakan terkait pencegahan Covid-19 juga perlu diindahkan. Apakah Pilkada perlu diselenggarakan di tengah pandemi atau ditunda saja? Atau adakah pilihan lain?

Pilkada tahun 2020 ini memang menarik untuk menjadi bahan diskusi bersama, terlebih tentang penyelenggaraannya. Oleh karena hal itu, pada kajian kali ini, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis secara khusus ingin menyoroti rencana penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini.

¹ Detik, "Pilkada 2020" diakses dari <https://www.detik.com/tag/pilkada-2020> pada 26 September 2020 pukul 22.05 WIB

² Wikipedia, "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia pada 26 September 2020 pukul 22.09 WIB

Kegiatan Pilkada di Tengah Pandemi

Rangkaian kegiatan Pilkada di Indonesia direncanakan mulai dari Agustus sampai Desember 2020. Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kejadian kegiatan Pilkada di tengah pandemi yang perlu menjadi sorotan sebagai berikut:

1. Kerumunan Pawai Pendukung

Paslon Walikota-Wakil Walikota Solo yakni Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Ba-Jo) pada 6 September 2020 lalu mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Solo diiringi dengan pawai lebih dari seribu orang. Sebelum melakukan pawai, para pendukung sebelumnya berkumpul terlebih dahulu di sekitar kediaman Bagyo Wahyono. Mereka mengenakan baju berwarna hitam serta membawa bendera pendukung. Tim pemenang Ba-Jo yaitu Robert Hananto menyatakan bahwa pendukung sudah memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak.³

2. Mobilisasi Massa Pendukung Paslon

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyatakan bahwa terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon pemimpin daerah saat pelaksanaan Pendaftaran Pilkada 2020. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan secara umum protokol kesehatan telah dipatuhi pihak penyelenggara atau KPU akan tetapi mobilisasi massa paslon menjadi permasalahan atau pelanggaran yang menonjol selama kegiatan yang diselenggarakan pada 4-6 September 2020.⁴

3. APD Petugas Yang Masih Bermasalah

³ Tempo, "Pilkada Solo, Rival Gibran Mendaftar ke KPUD Diiringi Pawai" diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1383301/pilkada-solo-rival-gibran-mendaftar-ke-kpud-diiringi-pawai> pada 26 September 2020 pukul 22.45 WIB

⁴ Aprianus Doni Tolok, "Pendaftaran Pilkada 2020, Bawaslu: Mobilisasi Massa Jadi Pelanggaran Umum" diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/15/1289990/pendaftaran-pilkada-2020-bawaslu-mobilisasi-massa-jadi-pelanggaran-umum> pada 26 September 2020 pukul 22.51 WIB

Melansir dari situ BBC Indonesia, Alat Pelindung Diri (APD) untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di berbagai daerah belum tersedia. Alasannya karena anggaran pembelian APD dari APBN yang belum cair.⁵

4. Teguran Terhadap Kepala Daerah Yang Melanggar Protokol Kesehatan Selama Penyelenggaraan Pilkada

Sebanyak 51 kepala daerah mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena tidak mematuhi protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada 2020. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menambahkan bahwa kemungkinan besar jumlah kepala daerah yang ditegur akan bertambah karena masih mengumpulkan bukti-bukti.⁶

5. Arak-arakan Massa Pendukung Paslon

Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana mendapat teguran keras secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena menggelar arak-arakan massa ketika pendaftaran calon pemilihan kepala daerah. Mendagri menilai bahwa Bupati Karawang selaku bakal paslon telah menimbulkan kerumunan massa dengan arak-arakan. Hal terserut bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19.⁷

Beberapa rangkaian kegiatan Pilkada di atas tentunya secara langsung dan tidak bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam menekan penurunan laju Covid-19. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penambahan angka positif Covid-19 yang timbul dari rangkaian penyelenggaraan Pilkada 2020. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan bahwa penambahan angka positif Covid-19 akhir-akhir ini juga disumbang dari adanya rangkaian kegiatan Pilkada. Ia merasa cukup prihatin dengan adanya calon kepala daerah

⁵ BBC News Indonesia, "Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan 'tak kunjung tersedia', Perludem: "Harus ditunda, jika APD tak tersedia" diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53067019> pada 26 September 2020 pukul 23.10 WIB

⁶ BBC News Indonesia, "Pilkada 2020: Mendagri 'tegur keras' 51 kepala daerah terkait pendaftaran calon pilkada yang 'tidak mematuhi protokol kesehatan'" diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54052726> pada 26 September 2020 pukul 23.18 WIB

⁷ Kiki Kurnia, "Gelar Arak-arakan Massa saat Pendaftaran Pilkada, Bupati Karawang Dapat Teguran Keras dari Mendagri" diakses dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35720387/gelar-arak-arakan-massa-saat-pendaftaran-pilkada-bupati-karawang-dapat-teguran-keras-dari-mendagri> pada 26 September 2020 pukul 23.23 WIB

yang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan massa di tengah situasi pandemi. Di mana, kerumunan massa tersebut dapat memicu penularan virus corona dan memunculkan klaster baru.⁸

Apa yang akan Terjadi Jika Pilkada Ditunda?

Seruan menunda pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2020 terus menggema. Faktor tingginya pelanggaran protokol Pilkada padahal baru masuk tahap pendaftaran, hingga fakta bahwa Ketua KPU dikonfirmasi positif Covid-19, jadi pertimbangan dalam menunda pilkada di tengah pandemi. Akan tetapi hal berbeda disampaikan oleh istana yang menegaskan bahwa pilkada serentak 2020 tetap akan berlangsung sesuai jadwal. Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman, menyampaikan pelaksanaan pilkada harus tetap mengutamakan kesehatan masyarakat, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Pemerintah pun mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat tanpa melihat warna zonasi daerah tersebut, kemudian dikatakan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak ini juga dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.⁹

Penundaan Pilkada juga bukan tanpa risiko. Apalagi, belum ada kepastian tentang berakhirnya pandemi corona. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jerry Sumampow menilai, opsi penundaan Pilkada Serentak tak mungkin dilakukan. Menurut dia, tidak ada waktu pasti jika Pilkada harus ditunda kembali. Sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 sudah ditunda dari yang awalnya direncanakan pada September, diundur menjadi 9 Desember 2020. Lebih lanjut,

⁸ Dani Prabowo, "Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19" diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/25/10422651/pilkada-2020-mulai-berdampak-pada-penambahan-kasus-covid-19> pada 26 September 2020 pukul 23.33 WIB

⁹ Republika, "Pilkada Dipastikan Pemerintah tak Bisa Ditunda", diakses dari : <https://republika.co.id/berita/qgzwlk328/pilkada-dipastikan-pemerintah-tak-bisa-ditunda>, pada 28 September 2020 pukul 16.55 WIB

menurut Jerry, jika Pilkada kembali ditunda, maka risiko resesi ekonomi juga akan muncul. Sebab, menurut dia, dengan Pilkada, ekonomi di daerah akan ikut terbantu. Dia berpendapat penundaan Pilkada Serentak bukan pilihan realistis.

"Pandemi ini paling tidak bisa kita alami 2-3 tahun, masa pilkada kita tunda selama itu. Saya kira enggak realistis juga, risikonya terlalu besar," tuturnya.

Saat ini yang paling penting dilakukan adalah dengan memperketat protokol kesehatan Covid-19. Menurut Jerry, saat ini, baik pihak penyelenggara maupun peserta masih terlihat belum berkomitmen penuh menjalani protokol kesehatan Covid-19.

Ia juga menilai bahwa mitigasi pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 masih belum terlihat. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya arak-arakan atau konvoi yang dilakukan para bakal paslon saat mendaftarkan diri di tahapan pendaftaran 4-6 September.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menilai penundaan Pilkada juga bukan langkah bijak saat ini. Menurutnya, saat ini, yang harus dilakukan KPU dan penyelenggara lain adalah mengevaluasi kerumunan yang terjadi pada tahapan pendaftaran kemarin.

"Pelanggaran-pelanggaran itu harus jadi pelajaran bagi penyelenggara dan peserta pemilu agar pada tahapan selanjutnya harus lebih awas dan serius mengikuti protokol," kata Lucius.

"Pelanggaran pada tahap pendaftaran juga menguji keberanian penyelenggara untuk tak menjadikan aturan pilkada di tengah pandemi sebagai aksesoris yang bahkan tak punya efek mendisiplinkan semua pihak agar patuh pada protokol," tambahnya.

Lucius menilai, persoalan pelanggaran protokol kesehatan kemarin murni kesalahan penyelenggara yang sejak awal tak serius mengantisipasi potensi pelanggaran selama tahapan Pilkada. Mereka bahkan kebingungan untuk menerapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan protokol kesehatan.

"Karenanya mau pilkada ditunda atau tidak jika kesiapan penyelenggara tak juga berubah, ya sama saja hasilnya," ujar dia.

Tidak hanya itu, Lucius juga menilai kesalahan juga dilakukan oleh para bakal paslon dan parpol pendukung yang mengedepankan nafsu untuk berkampanye, namun abai pada hal utama yang terkait dengan keselamatan pemilih. Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu sekaligus membuktikan kualitas calon yang diusung.

Menurut dia, dari kejadian tersebut terlihat bakal paslon tak peduli dengan keselamatan dan kesehatan warga di tengah pandemi. Mereka justru lebih fokus pada kepentingan dirinya untuk memenangi Pilkada.

Dari sisi kesehatan, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, idealnya pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda. Sebab, saat ini kapasitas *testing* untuk melacak kasus baru masih minim.

"Idealnya memang ditunda, hingga setidaknya *test positive rate* 5 persen selama dua minggu berturut-turut," kata Dicky.

Kendati begitu, menurut Dicky, jika memang keputusan politik pemerintah sudah menetapkan bahwa Pilkada Serentak tetap lanjut, maka satu-satunya jalan agar mengurangi risiko penularan adalah dengan mengetatkan aturan protokol kesehatan. Menurut Dicky, bila hal tersebut tidak diterapkan, maka Pilkada yang seharusnya pesta demokrasi akan berubah menjadi pesta Covid-19.

"Bila itu tidak dilaksanakan atau longgar dilaksanakan, maka potensi pesta demokrasi menjadi 'pesta kasus Covid' besar kemungkinan akan terjadi," tuturnya.

Dicky juga menyoroti soal *positivity rate* di beberapa daerah di Indonesia yang masih tinggi. Belum lagi munculnya varian mutasi virus corona D614G yang lebih menular daripada virus SARS-CoV-2.

Oleh karena itu, menurut Dicky, baik pemerintah maupun KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak harus mensosialisasikan secara masif protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia juga menyarankan agar tahapan Pilkada yang melibatkan massa dalam jumlah banyak seperti kampanye terbuka atau rapat umum tatap muka ditiadakan.

"Harusnya rangkaian kegiatan Pilkada yang melibatkan massa ditiadakan. Dan setiap calon kepala daerah diberi penjelasan aturan protokol kesehatan selama Pilkada dan sanksinya," tutur dia.¹⁰

Dampak Penundaan Pilkada dari Berbagai Aspek

Memasuki masa pemilihan kepala daerah di masa pandemi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul akibat ketidaksiapan pemerintah dan pihak lain dalam mengakomodasi berjalannya pilkada. Berbagai pihak dan golongan masyarakat menyuarakan agar pilkada yang akan diadakan pada desember ini untuk dilakukan penundaan dikarenakan situasi pandemi yang tidak menentu. Pada awalnya pilkada 2020 yang direncanakan sesuai jadwal akan diadakan pada bulan maret lalu, namun dengan berbagai pertimbangan pihak pemerintah dan KPU sepakat untuk melakukan penundaan hingga bulan desember yang saat itu diasumsikan bahwa kurva kenaikan positif covid-19 telah melandai, namun desakan untuk kembali menunda pikada pada bulan desember mendatang kembali mencuat dikarenakan kenaikan jumlah positif covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Untuk menilai baik-buruknya wacana penundaan pilkada ini, maka kita perlu melakukan penilaian dari berbagai aspek, antara lain :

¹⁰ CNN Indonesia , “Dilema Pilkada di Tengah Pandemi: Tunda atau Lanjut?” , diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200908114253-32-543914/dilema-pilkada-di-tengah-pandemi-tunda-atau-lanjut> , pada 28 September 2020 pukul 16.55 WIB

1. Aspek Hukum

Persoalan penundaan pemilihan umum/pilkada sebenarnya bukan hanya menjadi dilema Indonesia saja. berdasarkan data IDEA, ada sekitar 20 negara yang terpaksa melakukan penundaan pemilu lokal maupun nasional akibat pandemi, seperti Afrika Selatan, Argentina, Prancis, dan lainnya. Sebaliknya yang terjadi di Korea Selatan, pemilu di negara tersebut tetap dilanjutkan mengingat protokol kesehatan dan mitigasi di negara tersebut telah dipersiapkan dengan matang.

Dari aspek hukum, wacana penundaan pilkada pada desember mendatang memerlukan beberapa penyesuaian regulasi yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Keputusan untuk menunda pilkada tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah, DPR, ataupun KPU, melainkan membutuhkan payung hukum yang jelas dan kuat. Pilihan yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi UU pilkada ataupun menerbitkan perppu pilkada. Kedua pilihan tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin kegiatan pilkada yang diadakan KPU dapat diselenggarakan kemudian, namun melihat situasi yang saat ini, satu-satunya kemungkinan yang ada adalah Presiden melakukan penerbitan perppu pilkada. Selain penerbitan perppu, jika wacana penundaan pilkada diberlakukan maka peraturan KPU mengenai tahapan pilkada secara otomatis juga akan perlu di revisi mulai dari tahap penentuan pasangan calon, sampai pada pemungutan suara.¹¹

2. Aspek Ekonomi

Dari aspek ekonomi, wacana penundaan pilkada pada bulan desember mendatang akan mengakibatkan inefisiensi anggaran yang telah terlanjur dikeluarkan baik dari pihak KPU, maupun dari bakal calon. Ilham Saputra Komisioner KPU Jakarta selatan mengatakan bahwa penundaan pilkada pada desember mendatang sulit dilaksanakan karena sejumlah upaya-upaya telah terlanjur dilakukan oleh pihak KPU dalam mempersiapkan pemilihan kepala daerah pada bulan desember mendatang, “tetapi sekarang di bulan-bulan ini effort kita sudah maksimal, sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar kemudian juga sampai saat ini kita juga sudah menjalankan tahapan-

¹¹ Opini, 2020, “Dampak penundaan pilkada serentak 2020”, diakses dari: <http://m.batamtoday.com/berita-147592-Dampak-Politis-Penundaan-Pilkada-Serentak-2020.html> pada 26 september 2020 pukul 13.00 WIB

tahapan yang cukup krusial seperti pencalonan. Kemudian kita juga sudah menyiapkan beberapa regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kampanye melibatkan banyak instansi untuk kemudian sama-sama menjalankan pilkada ini dengan baik, jadi kalau ditunda banyak sekali energi yang sudah dikeluarkan oleh KPU termasuk juga anggaran,” ujar Ilham Saputra dalam wawancaranya dalam acara Mata Najwa¹².

3. Aspek Kesehatan

Melihat dari aspek kesehatan, wacana penundaan pemilihan kepala daerah ke tahun depan memiliki dampak yang baik terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan melakukan penundaan pilkada, pemerintah beserta dengan KPU dapat lebih mempersiapkan protokol pilkada secara lebih matang dan dengan penegakan yang konsekuen. Seperti yang kita ketahui, saat ini ada sebanyak 60 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19, sedangkan calon kepala daerah tersebut harus melakukan kampanye di berbagai tempat dengan massa yang dibatasi sebanyak 100 orang, meskipun pembatasan massa telah dilakukan, pelonjakan kasus covid-19 masih tetap beresiko dikarenakan ketidaktaatan para pendukung kepala daerah ketika menghadiri kampanye, oleh karena itu dengan melakukan penundaan, kita dapat meminimalisir resiko pertumbuhan kluster baru yang berpotensi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada sehat yang terdiri dari ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Net Grit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, Kemitraan berargumen bahwa pilkada serentak 2020 perlu ditunda paling lambat hingga september 2021 dengan alasan penyelenggaraan pilkada perlu memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Memaksakan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Antara lain terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada dengan Covid-19, politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan nonpetahana, dan turunnya partisipasi pemilih.¹³

¹² Lihat https://www.youtube.com/watch?v=opFkYEVvEls&t=447s&ab_channel=NajwaShihab

¹³ Koran sindo, 2020, “Penundaan Pilkada, Rem Darurat Cegah Kluster Baru Covid”, diakses dari: <https://nasional.sindonews.com/read/162040/12/penundaan-pilkada-rem-darurat-cegah-kluster-baru-covid-19-1599869369/> pada 26 september 2020 pukul 15.55 WIB

Rekomendasi Kebijakan Pilkada Ala Pandemi

Terdapat beragam pendapat dan solusi yang ditawarkan dari berbagai pihak, baik yang mendukung pilkada 2020, maupun yang menolak. Salah satu pihak yang menolak dan menyarankan pilkada untuk ditunda adalah dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Pihak Muhammadiyah menjelaskan keselamatan masyarakat di masa pandemi merupakan yang paling utama. Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien covid-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya, “keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu/pilkada yang berpotensi menjadi kluster penularan Covid-19” ujar Abdul Muti sekretaris umum PP Muhammadiyah dalam konferensi persnya¹⁴.

Pendapat yang serupa juga di suarkan oleh Komnas HAM yang menyarankan agar pilkada 2020 ditunda. Dalam rekomendasi tertulisnya, Wakil ketua Eksternal Komnas HAM Hairansyah, mengkhawatirkan apabila tahapan yang melibatkan pengumpulan massa yang besar akan menyebabkan pertambahan positif Covid-19, "Selanjutnya memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak, sedangkan pada sisi lain kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami trend yang terus meningkat terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada," ujarnya¹⁵.

Di sisi lain banyak juga pihak-pihak atau pengamat yang menyarankan agar pilkada 2020 tetap dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pihak yang mendukung pelaksanaan pilkada adalah dari pihak DPR RI. Menurut DPR, pelaksanaan pilkada 2020 tidak perlu ditunda mengingat penundaan tersebut telah dilakukan sebelumnya yang pada akhirnya disepakati oleh DPR, Pemerintah, dan KPU untuk melaksanakan Pilkada pada Desember 2020. Lagi pula, menurut DPR, pelaksanaan pilkada serentak terus dilakukan dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Hal senada disampaikan oleh pengamat politik dari UPH Emrus Sihombing yang mengatakan bahwa pilkada tidak harus ditunda, mengingat belum ada ilmu yang dapat memastikan kapan

¹⁴ Kompas.com, 2020, "Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada Ditunda", diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/11394051/demi-keselamatan-publik-pp-muhammadiyah-minta-pilkada-2020-ditunda?page=all> pada 26 september 2020 pukul 16.50 WIB

¹⁵ Hambali, 2020, "Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda, Ini Sikap KPU RI", diakses dari: <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/12/337/2276700/komnas-ham-minta-pilkada-ditunda-ini-sikap-kpu-ri> pada 26 september 2020 pukul 16.58 WIB

pandemi ini berakhir. Ia mengatakan guna meminimalisir kemunculan klaster baru akibat pilkada, semua pihak perlu menumbuhkan kesadaran terkait protokol kesehatan. Selain itu, ia mengatakan para ketua umum parpol perlu bersepakat untuk tidak mengadakan kampanye secara langsung, tetapi menggunakan media komunikasi seperti sosial media, dengan cara tersebut lonjakan positif covid-19 dapat diatasi.¹⁶

Meskipun terdapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak mengenai pilkada di masa pandemi, namun keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah bersama dengan KPU, dan kita mengharapkan apapun kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, hal tersebut seharusnya mengutamakan faktor keselamatan masyarakat, karena semua manusia mempunyai hak yang paling mendasar dan yang paling penting yaitu hak untuk mempertahankan kehidupannya.

SIKAP BEM USD

Maka dari itu, berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2020 menyatakan sikap untuk:

1. Mendukung penyelenggaraan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
2. Mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada 2020
3. Mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan faktor kesehatan masyarakat dibanding suksesnya pelaksanaan pilkada 2020

¹⁶ Very, 2020, "Pilkada Ditunda Atau Dilaksanakan", diakses dari: <https://indonews.id/artikel/312690/Pilkada-Ditunda-atau-Dilaksanakan-Ini-Solusi-yang-Ditawarkan-Pengamat/> pada 26 september 2020 pukul 17.13 WIB